

Pertumbuhan Ekonomi Sumatra Barat Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan belanja Daerah sebagai Pemediasi

Hartika Rhamedia^{1✉}, Hamdy Hady², Lusiana Lusiana³

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

hartikarhamedia79@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the influence of Regional Original Income, General Allocation Fund on Economic Growth with Regional Expenditure as an intervening variable in the regency / city government of West Sumatra Province. The type of data collected is secondary data obtained from the BPS website. The number of samples used was 95 from regencies/cities in West Sumatra Province. Methods of data analysis and hypothesis testing using descriptive statistical analysis, path regression analysis. The results of this study show that Regional Original Income (PAD), has a significant effect on Regional Expenditure (BD) in West Sumatra Province. The General Allocation Fund (DAU), has a significant effect on Regional Expenditure (BD) in Sumatra Province. Regional Original Income (PAD) has a significant effect on Economic Growth (GRDP) in West Sumatra Province. The General Allocation Fund (DAU), has a significant effect on Economic Growth (GRDP) in West Sumatra Province. Regional Spending (BD) has a significant effect on Economic Growth (GRDP) in West Sumatra Province. Regional Original Income (PAD), has a significant effect on Economic Growth (GRDP) through Regional Expenditure (BD) as an Intervening Variable in Sumatra Province. The General Allocation Fund (DAU), is not significant to Economic Growth (GRDP) through Regional Expenditure (BD) as an Intervening Variable in West Sumatra Province for the 2017-2021 Fiscal Year.

Keywords: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Regional Expenditure, and Economic Growth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening di pemerintahan kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BPS. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 dari daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat. Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera. Dana Alokasi Umum (DAU), tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi

Journal of Business and Economics is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota. Perbedaan karakteristik dari kabupaten/kota dilihat dari letak geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki, masing-masing wilayah kabupaten/kota mempunyai pengaruh yang kuat

terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan karakteristik dari kabupaten/kota menyebabkan terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidakteraturan ini berpengaruh pada kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah mampu mengalami pertumbuhan dengan cepat sementara di wilayah yang lain

mengalami pertumbuhan lambat (Adi, Nugroho Prasetyo, Hartono, 2007).

Kebijakan terkait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32/2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU Nomor 25/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Yoshanda, 2020).

Strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas dan baik melalui kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Melalui kebijakan desentralisasi, daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal diharapkan dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang sejalan dengan UU Nomor 32/2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat (Dewi, 2019).

Menurut (Putrayuda et al., 2017), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Menurut (Fusanto, 2018) Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode sebelumnya. Ada dua komponen yang bisa digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu: Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode satu tahun, berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Hal ini berarti pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung ke dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GNP. Pendapatan yang termasuk ke dalam GNP juga harus

merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau GNP adalah dengan membandingkan GNP di periode ini dengan GNP pada periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah atau wilayah adalah dengan menggunakan nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Siswiyanti (2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB atas harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

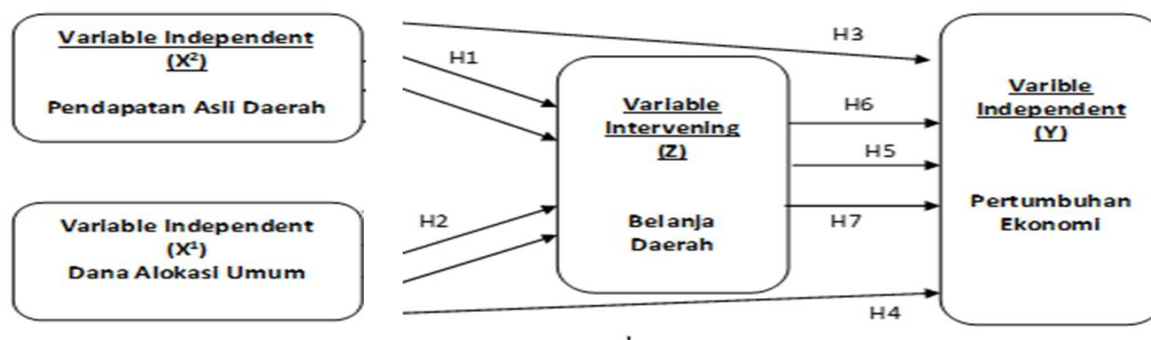
Menurut (Anita Sri Wahyuni, 2020) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut: "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBD". Menurut (Malau, 2013) pengertian dana alokasi umum sebagai berikut : "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi" (Bruce Sosola, 2004).

Belanja daerah (basis akural) merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Lincoln arsyad et al., 2017), mengemukakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Hal ini juga ditegaskan oleh (H Kara, 2014) yang menyatakan bahwa belanja daerah adalah sarana pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Singkatnya belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah otonom.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 pada pasal 36 menegaskan bahwa belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan menurut pasal 50 peraturan menteri dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki juga akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga turut meningkat.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi sangat berpengaruh terhadap belanja daerah. Dikarenakan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada pada pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang

merata, sistem pasar juga perlu diawasi dengan kebijakan pemerintah.

H₃: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

Pertumbuhan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada pada pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata, sistem pasar juga perlu diawasi dengan kebijakan pemerintah.

H₄: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerahnya didalam APBD untuk melaksanakan rencana pembangunan di daerah dalam bentuk proyek-proyek dan berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi dan diharapkan benar-benar langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah, APBD merupakan instrument kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Pengalokasian dana belanja daerah untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

H₅ : Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dikarenakan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

H₆: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

Faktor keuangan merupakan faktor essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah. Tanpa sumber-sumber keuangan yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang.

H₇: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat

2. Metodologi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Dana Alokasi Umum (DAU)* terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Peneliti melakukan penelitian ini pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan yang diteliti. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan (LRA) Provinsi Sumatera Barat, PDRB, tahun 2017-2021.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan data pengamatan mulai dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021 (5 tahun). Sampel dalam penelitian ini adalah data tahunan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *metode purposive sampling*. Tabel sampel terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Sampel Penelitian Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Agam
2	Kabupaten Dharmasraya
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Kabupaten Padang Pariaman
6	Kabupaten Pasaman
7	Kabupaten Pasaman Barat
8	Kabupaten Pesisir Selatan
9	Kabupaten Sijunjung
10	Kabupaten Solok
11	Kabupaten Solok Selatan
12	Kabupaten Tanah Datar
13	Kota Bukittinggi
14	Kota Padang
15	Kota Padangpanjang
16	Kota Pariaman
17	Kota Payakumbuh
18	Kota Sawahlunto
19	Kota Solok

Penelitian yang dilakukan Hendriwiyanto (2015;4) menyatakan bahwa : Terdapat dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga Konstan (ADHK) tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan cara membandingkan PDRB tahun tertentu dengan tahun sebelumnya berdasarkan ADHK.

Pendapatan asli daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan sampel dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau selama 5 tahun. Variabel pendapatan asli daerah ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel dana alokasi umum diukur

berdasarkan angka dari jumlah penerimaan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam Realisasi APBD Pemerintahan Sumatera Barat tahun 2017 – 2021.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. “Biaya dan belanja daerah juga diakui dengan basis kas

modifikasian, artinya kas keluar dari kas daerah dicatat pada saat pengeluaran kas tersebut selama tahun anggaran berjalan. Definisi dan pengukuran variabel terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Defenisi Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dankemakmuranmasyarakat meningkat.	PDRB Harga Konstan TahunDasar 2000 dari tahun 2017-2021	Rasio
PAD(X ₁)	Total Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah atau penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	Realisasi PAD tahun 2017-2021	Rasio
DAU(X ₂)	Total dana transfer yang bersifat umum (<i>block grant</i>) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah	Realisasi DAU tahun 2017-2021	Rasio
Belanja Daerah (Z)	Jumlah realisasi pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang dapat diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya	Realisasi Belanja Daerah (Belanja Langsung + Belanja Tidak langsung) tahun 2017 – 2021	Rasio

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan SPSS dan kemudian dianalisis. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data agar dapat menggambarkan suatu keadaan dan mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel in Berdasarkan olahan data SPSS. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas penelitian ini, maka peneliti

melakukan uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Penelitian ini, dilakukan pengujian variabel bebas (independent variable) terhadap dependent variable (variabel terikat) yang terdiri dari uji t (uji secara parsial), uji f (uji secara bersama-sama), dan pengujian koefisien determinasi (R²), dan analisis jalur.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil uji statistik deskriptif terdapat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	95	45358184,00	548653179266,00	108974132133,9368	103927079621,39032
DAU	95	168377000,00	1176301985000,00	587095185367,6212	197879022614,28818
PDRB	95	-10,46	6,23	3,4772	2,96505
BD	95	462498561707,00	2351499268940,00	1013150154819,9475	394240145254,10394
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 95 observasi data penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tertinggi sebesar 548653179266,00 nilai terendah sebesar 45358184,00, dengan mean (rata-rata) sebesar 108974132133,9368, serta standar deviasi sebesar 103927079621,39032.
2. Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai tertinggi sebesar 1176301985000,00 nilai terendah sebesar 168377000,00, dengan mean (rata-rata) sebesar 587095185367,6212, serta standar deviasi sebesar 197879022614,28818.
3. Pada variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai tertinggi sebesar 2351499268940,00, nilai terendah

sebesar 462498561707,00, dengan mean (rata-rata) sebesar 1013150154819,947, serta standar deviasi sebesar 394240145254,10394.

4. Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki nilai tertinggi sebesar 6,23, nilai terendah sebesar -10,46, dengan mean (rata-rata) sebesar 3,4772, serta standar deviasi sebesar 2,96505.

Dari hasil pengujian asumsi klasik, maka adata telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian regresi berganda dan analisis jalur.

Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Daerah (BD) dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4. Persamaan Regresi I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,737		-1,366	,181		
	Ln_PAD	,025	,011	,103	,023	,886	1,128
	Ln_DAU	1,061	,049	,933	,000	,886	1,128

a. Dependent Variable: Ln_BD

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu :

$$BD = -1,737 + 0,025PAD + 1,061DAU$$

Dari persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -1,737, artinya jika , PAD dan DAU bernilai konstan (tetap), maka nilai variabel BD nilainya adalah sebesar -1,737.
2. Koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,025, jika variabel PAD mengalami peningkatan satu (1)

satuan dengan asumsi variabel DAU bernilai konstan (tetap) maka variabel BD akan mengalami peningkatan sebesar 0,025.

3. Koefisien regresi variabel DAU sebesar 1,061, jika variabel DAU mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel PAD bernilai konstan (tetap) maka BD akan mengalami peningkatan sebesar 1,061.

Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah (BD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Hasil Uji Linier Berganda Model II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,176	3,235		-,363	,719		
	Ln_PAD	,051	,026	,050	1,963	,039	,452	2,212
	Ln_DAU	1,383	,871	3,862	1,587	,023	,009	1,886
	Ln_BD	-1,300	,782	3,106	-1,661	,031	,008	1,188

a. Dependent Variable: Ln_PDRB

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 1,176 + 0,051PAD + 1,383DAU - 1,300BD$$

Dari persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 1,176, artinya jika PAD,DAU,dan BD bernilai konstan (tetap), maka nilai variabel PDRB nilainya adalah sebesar 1,176.
2. Koefisien regresi variabel PAD sebesar 0,051, jika variabel PAD mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel DAU dan BD bernilai konstan (tetap) maka variabel PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 0,051.

3. Koefisien regresi variabel DAU sebesar 1,383, jika variabel DAU mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel PAD dan BD bernilai konstan (tetap) maka PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 1,383.

4. Koefisien regresi variabel BD sebesar -1,300, jika variabel BD mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel PAD dan DAU bernilai konstan (tetap) maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar -1,300.

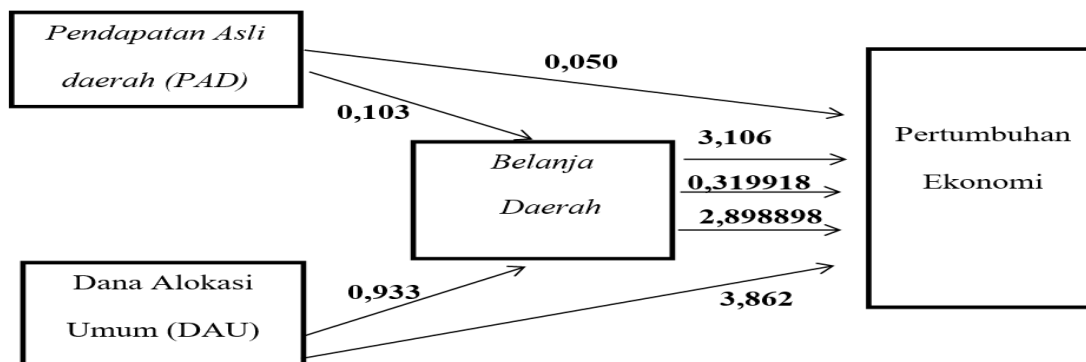
Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5, maka hasil analisis jalur dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6.
Hasil Ringkasan Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengaruh Varibel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Z	Total Pengaruh	Sig
X1 – Z	0,103	0,319918	0,369918	0,023
X1 – Y	0,050			0,039
X2 – Z	0,933	2,898898	6,760898	0,000
X2 – Y	3,862			0,023
Z – Y	3,106			0,031

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Diagram jalur terdapat pada gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Diagram Jalur

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,377 dengan signifikan sebesar $0,023 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki juga akan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga turut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Baghiu et al., 2021), dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (BD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 21,561 dengan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD). Dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima.

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi sangat berpengaruh terhadap belanja daerah. Dikarenakan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fadilah & Helmayunita, 2020) yang dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (BD).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,963 dengan signifikan sebesar $0,039 > 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Dengan demikian H_0 diterima H_a ditolak.

Pertumbuhan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada pada pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Di negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata, sistem pasar juga perlu diawasi dengan kebijakan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ningsih & Noviaty, 2019), yang dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,587 dengan signifikan sebesar $0,023 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dengan demikian H_0 diterima H_a ditolak.

Infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan belanja daerah agar infrastruktur terlaksana dibutuhkan pendapatan asli daerah yang tinggi.

Dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja daerah dikarenakan belanja daerah lebih didominasi oleh dana alokasi umum. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana alokasi umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitain yang dilakukan (Kurnia, 2019) ia menemukan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Belanja Daerah (BD) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,661 dengan signifikan sebesar $0,031 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima..

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerahnya didalam APBD untuk melaksanakan rencana pembangunan di daerah dalam bentuk proyek-proyek dan berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi dan diharapkan benar-benar langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah, APBD merupakan instrument kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Pengalokasian dana belanja daerah untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitain yang dilakukan (Megasari, 2018) yang dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Belanja Daerah (BD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening. Dengan demikian H_0 ditolak H_a , diterima.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja daerahnya didalam APBD untuk melaksanakan rencana pembangunan di daerah dalam bentuk proyek-proyek dan berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi dan diharapkan benar-benar langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah, APBD merupakan instrument kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Pengalokasian

dana belanja daerah untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitain yang dilakukan (Mega Sukmawati, 2019), yang dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memoderasi belanja daerah. berarti Belanja Daerah (BD), dapat memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening. Berarti Belanja Daerah (BD) tidak mampu memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Dengan demikian H_0 ditolak, H_a diterima.

Faktor keuangan merupakan faktor essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya.. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitain yang dilakukan (Mega Sukmawati, 2019) yang dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memoderasi belanja daerah.

4. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian maka hasil uraian tentang mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), dengan Belanja Daerah (BD) sebagai variabel intervening di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021.

Daftar Rujukan

- Adi, Nugroho Prasetyo, Hartono, A. P. (2007). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Ertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening*. 23(39870423), 946–952.
- Agustini, M. Y. D. H. (2018). Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Berdasarkan Teori Ekonomi. In *Universitas Katolik Soegijaprana*.
- Anita Sri Wahyuni. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *STEI Ekonomi*, XX(Xx), 1–22.
- Baghiu, E. T., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2021). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No . 03 Oktober 2021 ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Elsa Trisilia Baghiu Elsa Trisilia Baghiu*. 21(03), 46–56.
- Carunia. (2018). Teori Pendapatan Asli Daerah, Instrument Pendapatan Asli Daerah , Pembiayaan Pembangunan Daerah., (*Carunia, 2017: 119*)., 51(1), 51.
- Chalik, I. (2021). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham (Studi Kasus Indeks Saham Lq45 Tahun 2015-2018)*.
- Desky, T. R. (2020). Pengaruh Investasi, Ekspor dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variable Intervening di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*, 1–119.
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat. *Journal of Economic*, 01(04), 1–19.
- FADHILAH, A. (2022). *Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan*. <https://dx.doi.org/10.31219/osf.io/7fx5v>
- Fadhly, Z. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*, 1(1), 1–15.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Fusanto. (2018). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Dengan Belanja Daerah Sebagai Intervening*.
- Harahap, R. D. dkk. (2019). Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 2.
- Herispon. (2018). Ekonomi Mikro. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Husni, Y. L. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018. *Tesis*. <https://www.usu.ac.id/id/fakultas.html>
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/4634/4418>
- Kumia, F. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kota Padang*.
- Lestari. (2018). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari. *Lestari*, 1–83.
- Malau, Y. N. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara. *Tesis*, 1–102.
- Matter, M. (2021). Mikro. *Schweizerische Ärztezeitung*. <https://doi.org/10.4414/saez.2021.19934>
- Mega Sukmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018). *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Megasari, M. (2018). Pengaruh Faktor Kelas Sosial Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pemilihan Pakaian Di Desa Lalego Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timu. *Journal of Islamic Management And Bussines*, 1(1), 17–24.
- Nainggolan, N. P., & Henryenzus. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi return saham. *Jurnal Agribisnis*, 11(6), 183–201.
- Nasrudin, R. (2013). *Kuliah IV-Analisis Perilaku Produsen : Konsep Produksi Konsep Return to Scale Hubungan antara Penggandaan Input terhadap Output*.
- Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i2.67>
- Onainor, E. R. (2019). *Belanja Modal*. 1(4), 105–112.
- Putrayuda, T. F., Efni, Y., & Kamilah. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(3), 198–224.
- Rachman, T. (2018). Kepatuhan Pajak Dalam Pemerintahan Menurut Golongan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17.

- <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Universitas Sam Ratulangi Manado*, 1(4), 1677–1686.
- Wibowo, A., & Monalisa, M. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 212–225. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i2.185>
- Yoshanda, A. A. (2020). Pendapatan Nasional. *Jurnal Umsida*, 148, 148–162. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6990>
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.338>